



Program Sekolah Gratis Mulai Jalan

Tunda Investasi, Gunakan Dana Cadangan

JOGJA-- Program peng-gratisan biaya operasional sekolah yang digulirkan oleh pemerintah pusat diakui cukup mendadak bagi sejumlah sekolah. Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah dibuat pun tak lagi bisa digunakan. Untuk menutupi biaya kegiatan operasional hingga dana BOS daerah (BOSDA) yang dijanjikan dari APBD Kota Jogja turun, sejumlah sekolah menggunakan dana "cadangan" yang mereka miliki.

Di SD Negeri Serayu, kegiatan operasional saat ini dibiayai dengan dana cadangan yang merupakan pinjaman dana yang telah terkumpul dari Komite Sekolah. Dana tersebut, menurut Kepala SDN Serayu Dra Erna Krumaningih, hanya dipinjam dan nantinya akan dikembalikan lagi kepada Komite Sekolah jika BOSDA sudah turun.

Menurutnya, dana pinjaman dari Komite Sekolah-- yang telah terkumpul sebelum Surat Edaran dari Mendiknas RI tentang penggratisan biaya operasional turunan-- dialokasikan untuk sejumlah pos, seperti biaya ujian untuk kelas 6, pembelian ATK, biaya kegiatan TPA, dan les renang.

1. V "Kegiatan seperti renang tetap diadakan meskipun frekuensinya dikurangi. Selain itu,
2. V masih ada kegiatan lain yang dibiayai orangtua karena memang kegiatan tersebut dari pihak luar, bukan pihak sekolah.
3. S
4. A

Misalnya les biola, komputer, sempoa, dan bahasa Inggris. Sementara untuk pembangunan gedung, pengadaan buku, dan lainnya kami dibiayai pemerintah melalui DAK (Dana Alokasi Khusus, red)," terang Erna ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/2). Di sisi lain, Erna juga berpendapat, sebenarnya tidak akan adil jika besaran BOS disamaratakan bagi semua siswa.

"Tidak adil kalau BOS disamaratakan bagi sekolah maju dan yang belum maju, bagi siswa yang kaya dan yang kurang mampu," tambahnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 13 Jogja Suprptama SPD menampik adanya pemberitaan bahwa pembangunan gedung di sekolah tersebut berhenti karena kebijakan baru tersebut. Ia mengaku, saat ini pembangunan fasilitas gedung perpustakaan (bukan pembangunan tambahan kelas, red.) masih tetap berjalan.

"Kebijakan tersebut memang jelas berpengaruh, tapi saat ini pembangunannya tetap masih berjalan. Tapi memang kalau dulu misalnya ada 12 tukang yang kami pekerjakan, sekarang cukup lima orang. Pembangunan dimulai bulan November 2008 dan saat ini telah 60 persen selesai," ungkap Suprptama di ruang kerjanya, kemarin.

Seperti diberitakan di Bemas Jogja edisi Selasa (17/2) kemarin, Rapat Kerja Komisi I dengan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin

(16/2) lalu sempat membahas tentang belanja modal sekolah yang bersifat investasi. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ardianto dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Drs Syamsury MM ini, diungkapkan bahwa pembebasan siswa SD dan SMP Negeri dari pungutan membuat sekolah tidak lagi leluasa melakukan investasi, seperti menambah gedung dan fasilitas lain. Saat itu, dicontohkan SMPN 13 yang menghentikan pembangunan tambahan kelas yang sudah setengah jadi.

Suprptama mengungkapkan, sebelum ada kebijakan larangan pungutan tersebut, Komite Sekolah telah menetapkan dana *sharing* sebesar Rp 1 juta per siswa, kecuali siswa pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS). Hanya saja, hingga Desember 2008 lalu baru 38 siswa yang membayar. Setelah ada kebijakan sekolah gratis, menurutnya, ada pemahaman yang berbeda dari orangtua siswa. Kesepakatan tentang dana *sharing* yang telah ditetapkan sebelum ada kebijakan tersebut pun sulit dilakukan, otomatis dana *sharing* yang terkumpul tidak memenuhi target.

"BOSDA tidak boleh digunakan untuk pembangunan gedung, hanya boleh digunakan untuk rehab ringan dan biaya operasional lain termasuk biaya untuk mengikuti kegiatan perlombaan," tambahnya. (ovi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005